



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN - I TA. 2023

**Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Triwulan I Tahun 2023 Deputy

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal Bulan Februari 2023. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

LAKIP ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2023. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputy SD Maritim hingga Triwulan I Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 10 April 2023
Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,

Mochammad Firman Hidayat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
BAB II RENCANA KINERJA	6
2.1. Sasaran Strategis (SS)	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	8
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	8
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	9
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	17
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	18
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	58
3.2. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	66

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada setiap triwulan dengan triwulan 1-4 didapatkan output antara dan pada triwulan 4 output dan outcome akhir dihasilkan. sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dan serta pelaporan output antara dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi SD Maritim pada TA 2023.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;
- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

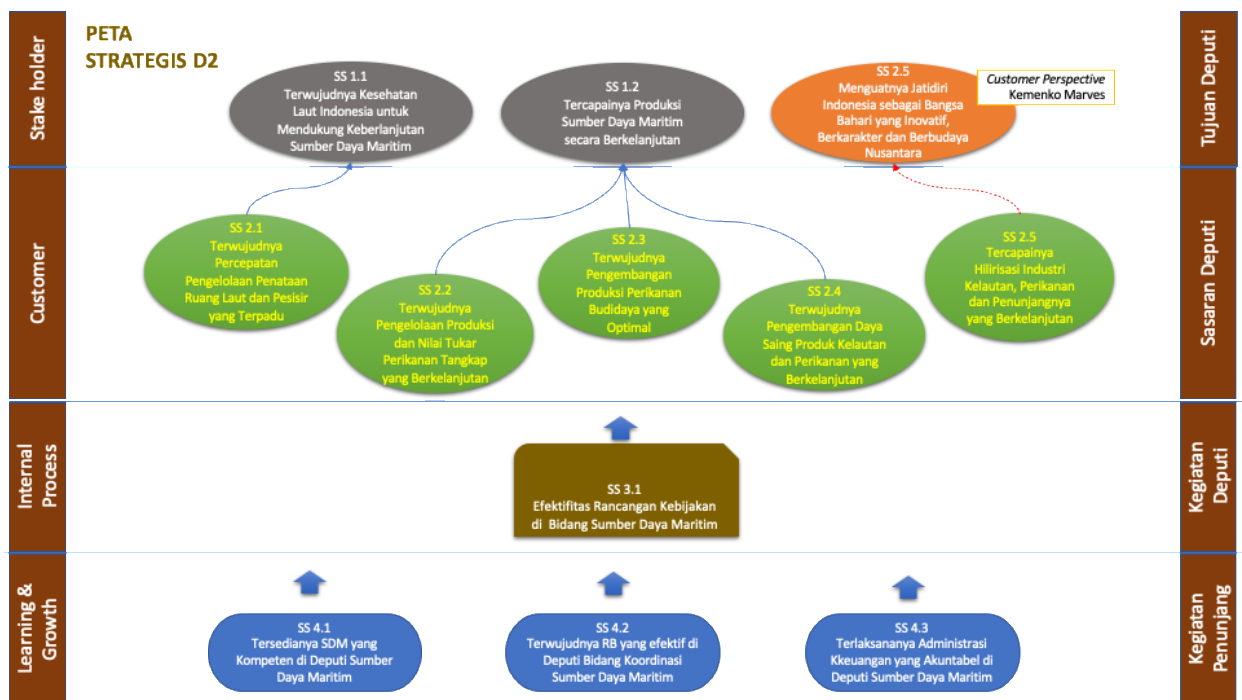
Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.

2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 1. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2023

SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1	Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	90%
		2	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien	5	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	76
		6	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	90%

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. IKU.1 Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan.

Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2023 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2023. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2023.

Formula:

$$\frac{\text{(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023)}}{\text{(Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 + Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023)}} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2023}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2023}} \times 100\%$$

2

2. IKU.2 Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut adalah

1. Laut Sebagai Sumber Pangan
2. Laut Untuk Perikanan Skala Kecil
3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam
4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon
5. Laut Sebagai Perlindungan Pesisir
6. Laut Sebagai Sumber Matapencaharian dan Ekonomi
7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi
8. Laut Sebagai Tempat Perlindungan dan Tempat Ikonis
9. Laut Sebagai Perairan Yang Bersih
10. Keanekaragaman Hayati

Formula:

IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

3. IKU.3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rekomendasi kebijakan.

Formula:

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya
Maritim yang ditindaklanjuti

x 100%

Total Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya
Maritim

4. IKU.4 Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan

Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan merupakan capaian yang didapatkan dari perbandingan jumlah isu-isu strategis yang diselesaikan dengan total dari isu-isu strategis yang akan diselesaikan

Formula:

Jumlah Isu-Isu Strategis yang diselesaikan

x 100%

Total Isu-Isu Strategis

5. IKU.5 Nilai PMPRB pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai

bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

6. IKU.6 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Dalam mendukung capaian SS Deputy SD Maritim terdapat 7 (tujuh) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.500.000.000,-

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1040/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-	Rp155.150.000,-	1.344.850.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.500.000.000,-	Rp. 975.150.000,-	Rp13.524.850.000

3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2023 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputy Koordinasi SD Maritim TA 2023:

Tabel 5. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW I 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia	<p>3 Kegiatan utama dalam Pelaksanaan Perhitungan IKLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut : Tahun 2023 difokuskan pada Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pipa Kabel Bawah Laut di Indonesia. Telah diluncurkan website E-PIPAKABEL yang digunakan sebagai instrumen resmi Timnas Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa Kabel Bawah Laut dalam melakukan move pelaksanaan probis pipa -kabel di Indonesia. Pelaksanaan Hari Nusantara 2023 Saat ini sudah berproses dan telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk audiensi calon tuan rumah Harnus 2023 (Kota Tidore Kepulauan dan Kab. Seluma). ND terkait kegiatan sudah disampaikan ke Deputy SDM, sehingga untuk tindak lanjut menunggu arahan dari Deputy SDM. IKLI Pengumpulan dan perhitungan data IKLI menunggu K/L teknis terkait untuk merilis data perhitungan tahun sebelumnya (umumnya TW II dan III)
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)	<p>Telah dilakukan beberapa pertemuan yang membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan TUSI dan keanggotaan Co-chairs Task Force dari K/L Identifikasi program kerja dari setiap Task Force terkait dengan target RPJMN dalam NBAAP Kordinasi Internal Task Force
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	<p>Beberapa masalah yang sering muncul dalam infrastruktur perikanan tangkap antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usia dan kondisi pelabuhan: Banyak pelabuhan perikanan tangkap di dunia yang sudah tua dan membutuhkan perbaikan. Kekurangan peralatan dan fasilitas yang memadai dapat menghambat efisiensi operasional; Kapal penangkap ikan: Beberapa daerah masih menggunakan kapal penangkap ikan yang usang dan kurang efisien. Kapal yang tidak memenuhi standar keamanan atau tidak dilengkapi dengan peralatan tangkap yang tepat dapat menyebabkan kerugian sumber daya perikanan dan berdampak negatif pada lingkungan; Infrastruktur pengolahan dan penyimpanan: Fasilitas pengolahan ikan yang terbatas atau kurang modern dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan ikan yang ditangkap. Sistem penyimpanan yang buruk juga dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian stok ikan; dan Akses ke pasar. Salah satu permasalahan pelabuhan yang ada adalah SKPT Natuna. Dimana telah dilaksanakan koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu dalam penyelesaian permasalahan SKPT Natuna dimana telah dilaksanakan kunjungan lapang dan beberapa kali rapat koordinasi dalam permasalahan penetapan pengembangan SKPT Natuna. Serta melihat kesiapan Natuna sebagai salah satu sentra kelautan perikanan yang memadai dalam menunjang fasilitas pelabuhan di wilayah perbatasan
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Blue Halo S	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan kick off meeting dan sosialisasi terkait tindak lanjut Blue Halo S pasca penandatanganan saat G20. Telah dibentuk juga komite teknis antara pusat daerah dan mitra pembangunan dalam melaksanakan kajian awal pelaksanaan penyusunan mekanisme Blue Halo S. Adapun tujuan dari dibentuknya komite teknis adalah memberikan arahan strategis dan memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait pada proses desain proposal pembiayaan Blue Halo S. Peran dari komite teknis diantaranya mendukung rencana kerja: tujuan, rencana kerja, hasil, dan menyepakati cara kerja, peran dan tanggung jawab semua pihak,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW I 2023
				memberikan arahan penyusunan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek (project implementation arrangement) Blue Halo S, memantau perkembangan dan mendukung penyelesaian masalah jika ditemukan
3			Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Sofifi Maluku Utara	Fokus kegiatan percepatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 berjumlah 24 kegiatan, yaitu 11 kegiatan akan dilaksanakan oleh K/L; 9 kegiatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara; 3 kegiatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kegiatan; dan 1 Kegiatan melalui pendanaan swasta/KPBU (lampiran II)
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persoalan aktivitas pertambakan udang di Karimunjawa. Kondisi saat ini terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat limbah organik dari pertambakan eksisting. Diperlukan revisi peraturan daerah untuk melarang tambak baru dan pengawasan tambak eksisting yang tidak sesuai. Sebagai solusi, pemerintah telah melaksanakan program moratorium tambak baru, pembuatan IPAL, sosialisasi CBIB, penerapan pengelolaan limbah, sistem IMTA, dan sosialisasi pedoman pengelolaan limbah. Keseluruhan hal tersebut dijalankan untuk mencegah dampak buruk dan memastikan pengelolaan yang lebih baik. • Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi terkait revitalisasi pertambakan udang di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menghadapi beberapa isu strategis dalam upaya peningkatan produksi udang, seperti pendangkalan saluran irigasi, pengelolaan lahan tambak yang masih tradisional, kualitas input produksi yang kurang memadai, akses pendanaan yang terbatas, dan penurunan daya dukung lingkungan. Solusi yang diusulkan meliputi sinergi kebijakan dan program dengan kabupaten dan stakeholder terkait, bimbingan teknis kepada petambak, pemantauan kualitas air dan lingkungan secara berkala, pembinaan kelompok, revitalisasi saluran irigasi, pemberian bantuan alat sedot lumpur, dan perbaikan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah sedimentasi dan pendangkalan saluran irigasi, direkomendasikan pengerukan sedimen dengan metode build with nature, merubah daerah sekitar teluk menjadi kawasan bakau, dan melakukan prafeasibility study revitalisasi tambak. Kementerian PUPR dan Kementerian I&W Belanda bekerja sama dalam program Partners for Water untuk meneliti penurunan produktivitas udang dan ikan di Sidoarjo. EcoShape, konsorsium Sektor Air Belanda, mengusulkan agar menerapkan prinsip Building With Nature pada upaya revitalisasi. Konsepnya yaitu menciptakan lahan basah di sepanjang anak sungai dan membentuk hutan bakau di muara sungai. Hal Ini dinilai akan dapat meningkatkan keuntungan pembudidaya, mengurangi banjir perkotaan, dan memberikan manfaat ekologis dan penyimpanan karbon. • Telah dilaksanakan Steering Commite Meeting POKJA Peningkatan Industri Udang Nasional. Kondisi eksisting ekspor udang Indonesia belum mencapai target, sementara isu yang dihadapi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi global dan inflasi tinggi di negara tujuan ekspor. Solusinya meliputi strategi budidaya udang seperti revitalisasi tambak tradisional, pembangunan tambak terintegrasi, peningkatan nilai tambak melalui program PHLN, dan implementasi regulasi untuk peningkatan produksi. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memperhatikan sertifikasi, irigasi tambak, dan kerja sama investasi dengan negara seperti Tiongkok.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW I 2023
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persoalan aktivitas pertambakan udang di Karimunjawa. Kondisi saat ini terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat limbah organik dari pertambakan eksisting. Diperlukan revisi peraturan daerah untuk melarang tambak baru dan pengawasan tambak eksisting yang tidak sesuai. Sebagai solusi, pemerintah telah melaksanakan program moratorium tambak baru, pembuatan IPAL, sosialisasi CBIB, penerapan pengelolaan limbah, sistem IMTA, dan sosialisasi pedoman pengelolaan limbah. Keseluruhan hal tersebut dijalankan untuk mencegah dampak buruk dan memastikan pengelolaan yang lebih baik. • Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi terkait revitalisasi pertambakan udang di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menghadapi beberapa isu strategis dalam upaya peningkatan produksi udang, seperti pendangkalan saluran irigasi, pengelolaan lahan tambak yang masih tradisional, kualitas input produksi yang kurang memadai, akses pendanaan yang terbatas, dan penurunan daya dukung lingkungan. Solusi yang diusulkan meliputi sinergi kebijakan dan program dengan kabupaten dan stakeholder terkait, bimbingan teknis kepada petambak, pemantauan kualitas air dan lingkungan secara berkala, pembinaan kelompok, revitalisasi saluran irigasi, pemberian bantuan alat sedot lumpur, dan perbaikan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah sedimentasi dan pendangkalan saluran irigasi, direkomendasikan pengerukan sedimen dengan metode build with nature, merubah daerah sekitar teluk menjadi kawasan bakau, dan melakukan prafeasibility study revitalisasi tambak. Kementerian PUPR dan Kementerian I&W Belanda bekerja sama dalam program Partners for Water untuk meneliti penurunan produktivitas udang dan ikan di Sidoarjo. EcoShape, konsorsium Sektor Air Belanda, mengusulkan agar menerapkan prinsip Building With Nature pada upaya revitalisasi. Konsepnya yaitu menciptakan lahan basah di sepanjang anak sungai dan membentuk hutan bakau di muara sungai. Hal ini dinilai akan dapat meningkatkan keuntungan pembedudaya, mengurangi banjir perkotaan, dan memberikan manfaat ekologis dan penyimpanan karbon. • Telah dilaksanakan Steering Commite Meeting POKJA Peningkatan Industri Udang Nasional. Kondisi eksisting ekspor udang Indonesia belum mencapai target, sementara isu yang dihadapi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi global dan inflasi tinggi di negara tujuan ekspor. Solusinya meliputi strategi budidaya udang seperti revitalisasi tambak tradisional, pembangunan tambak terintegrasi, peningkatan nilai tambak melalui program PHLN, dan implementasi regulasi untuk peningkatan produksi. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memperhatikan sertifikasi, irigasi tambak, dan kerja sama investasi dengan negara seperti Tiongkok.
3			Koordinasi Pengembangan Seaweed Estate Terintegrasi	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama tim NIFS Korea terkait pengembangan akuakultur modern yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa terdapat lokasi yang sesuai untuk pengembangan budidaya ikan Napoleon di Pulau Natuna dan Pulau Anambas, hal ini dikarenakan di wilayah tersebut terdapat kelimpahan benih yang tinggi. Namun, terdapat beberapa persoalan seperti teknologi pendederan yang sampai saat ini belum berhasil. Untuk itu, diperlukan kerjasama lintas stakeholders yang kompeten dalam hal pengembangan teknologi pendederan Napoleon. Dalam waktu dekat perlu dilakukan peninjauan lapangan bersama dengan melibatkan Balai dan Dinas KP setempat, setelah itu perlu membuat kerangka milestone jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyusun payung hukum kerjasama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW I 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada perjanjian kerja sama proyek Solar Cold Chain for a Green Economy (SOCOOL) dengan GIZ, final draft perjanjian sudah tersusun dan sedang dalam tahap pembahasan internal Kemenko Marves • Penyiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai Hub Ekspor Produk Kelautan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> ◦ telah dilakukan FGD bersama Kemenko Ekon, Pemda, BKIPM, Lembaga National Single Window (LNSW), Ditjen. Perhubungan Udara Kemenhub, PT Garuda Indonesia, PT Lion Air, PT Angkasa Pura I, ARPI, AP5I, AKKI tanggal 15 Maret 2023 ◦ Aplikasi Single Submission Ekspor (SSm Ekspor) sudah disiapkan oleh LNSW namun masih memerlukan penyesuaian ◦ Akan melakukan pembahasan lanjutan untuk Pelayanan Satu Atap (One Roof System) antara Bea Cukai, BKIPM, Angkasa Pura I dan Regulated Agent • Pada dukungan pembangunan industri perikanan modern Kab. Tambrauw, telah dilaksanakan rapat bersama Pemda, Bappenas, KKP, Koarmada III, PANGDAM XVII, Kementerian PUPR, Kemenhub: <ul style="list-style-type: none"> ◦ telah mengusulkan ke kemenhub terkait penggunaan pelabuhan umum Sausopor sebagai pelabuhan perikanan ◦ Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan 1000 Ha untuk lokasi pembangunan industri perikanan modern kab. Tambrauw ◦ Kab. Tambrauw direncanakan menerima dukungan CS Portable Tahun 2023 oleh Ditjen. PDSPKP KKP • Persiapan Dukungan Rangkaian Kegiatan Sail Teluk Cendrawasih Tahun 2023 "Ekspor Langsung dari Kab. Biak Numfor": <ul style="list-style-type: none"> ◦ telah dilakukan rapat koordinasi antara Pemda dengan Unit Kerja Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim untuk mendengar kebutuhan Sarana Prasarana Rantai Dingin di Kab. Yapen, Kab. Waropen, dan Kab. Sarmi untuk mendukung ekspor langsung dari Kab. Biak Numfor
2			Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer;	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk capaian progress TW I 2023 yaitu berdasarkan update perkembangan tahun 2022 • Hasil Rakor Tahun 2022 bersama K/L terkait tentang perlunya pengembangan pemanfaatan teknologi Iradiasi pada sentra produksi Hasil kelautan dan perikanan • Surat undangan Audiensi kepada PT Nucotech Company Ltd terkait Rencana pengembangan E-Beam Irradiator di wilayah Indonesia
3			Rumusan Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi	Telah dilakukan identifikasi petugas mutu di Pelabuhan Perikanan wilayah Pantura Pulau Jawa
4			Rumusan Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • telah melakukan optimalisasi BUMN Perikanan (PT Perindo) untuk meningkatkan ekspor produk kelautan perikanan • telah melaksanakan audiensi dengan Ketua Nusatic untuk persiapan pelaksanaan NUSATIC TA 2023 yang rencananya dilaksanakan pada Juli 2023 • telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kab. Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan layur oleh PT Perindo • telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemda Biak Numfor dan berkoordinasi dengan Pemda Yapen, Waropen dan Sarmi untuk memenuhi kuota ekspor produk kelautan perikanan
5		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk Ekspor KP ke China	Berdasarkan GACC Announcement nomor 131 tahun 2022 terkait manajemen karantina produk impor disampaikan bahwa GACC sejak 8 Januari 2023 GACC tidak memberlakukan uji covid-19 di Pelabuhan Penerima -dari 521 UPI yang merupakan pengeksportir ke China, terdapat 103 UPI yang sudah dapat izin ekspor ke China sampai dengan tahun 2028,177 UPI sedang proses pengajuan approval number melalui aplikasi CIFER, 22 UPI ditolak, 16 UPI belum bisa mengakses aplikasi, 51 UPI di suspend, dan 161 UPI tidak ingin melakukan registrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW I 2023
				**untuk lebih lengkap dapat melihat ND berikut https://drive.google.com/file/d/1qBk4ZAhnWT3kQd6M5e1zT19mqNu_SRA3/view?usp=share_link
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Dokumen Rpermenko tentang pergaraman Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional telah diharmonisasikan melalui rapat harmonisasi yang dipimpin oleh Kemenkum HAM dihadiri oleh Biro Hukum Marves, Kedeputusan Bidang Koordinasi SDM Marves, dan Sekretariat Kabinet
2			Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya	Dokumen hasil koordinasi PT Rumah Rumput Laut dan dokumen hasil rapat koordinasi / audiensi dengan pengusaha rumput laut
3			Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> IA Pendirian dan Pengoperasian Korea-Indonesia MTCRC akan selesai pada 9 Mei 2023, telah dilaksanakan drafting terkakit perpanjangan IA dengan beberapa perubahan dan tambahan pada IA yang baru. Sehubungan dengan adanya usulan ODA project Blue Carbon pada tahun 2024, Kemenko Marves dan MTCRC sudah menyampaikan Project Concept Paper secara resmi kepada Bappenas dan akan diteruskan oleh Bappenas ke Embassy of Republic Korea untuk mendapatkan persetujuan. Berkaitan dengan dengan itu, pada Januari 2023 telah diadakan workshop mengenai blue carbon di Bali bersama dengan akademisi, expert dari Indonesia dan Korea sebagai langkah awal dalam Blue Carbon Project ini. ODA Project Satelit (Establishment Of Application System For Managing Indonesia's Water Using Korea's Geostationary Satellite) antara Korea dan Indonesia yang sempat terhenti pada akhir tahun 2022, akan dilanjutkan kembali setelah adanya kesepakatan pada Internal Korea dan Kemenko Marves akan menyampaikan Draf IA yang sudah ada untuk dapat dibahas kembali.
4			Persentase Isu-isu Strategis yang diselesaikan	Kerja Sama Riset Kelautan dan Teknologi, Kepedulian Media (Media Awareness) dan Peningkatan Kapasitas

Berikutnya pada setiap kinerja, berikut adalah penjelasan setiap output antara yang dihasilkan dengan kendala serta tindak lanjut pada triwulan berikutnya:

3.1.1 Sasaran Strategis 1 (SS.1) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

1. Indikator Kinerja 1 adalah “Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan”

Indikator ini menggambarkan Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan. Capaian ini ditargetkan persentasenya dicapai pada TW IV TA

2023 dengan target capaian 90%. Capaian ini berasal dari kegiatan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan, Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk capaian output antara, faktor pendukung, kendala dan tindak lanjut terkait kegiatan pengendalian tersebut telah disampaikan pada bagian persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya maritim yang ditindaklanjuti.

2. Indikator Kinerja 2 adalah **“Indeks Kesehatan Laut Indonesia”**

Indikator ini menggambarkan Capaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia TA 2023. Capaian ini ditargetkan persentasenya dicapai pada TW IV TA 2023 dengan target capaian 76. Capaian ini berasal dari kegiatan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Untuk capaian output antara, faktor pendukung, kendala dan tindak lanjut terkait kegiatan pengendalian tersebut telah disampaikan pada bagian persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya maritim yang ditindaklanjuti.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS.2) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim

3. Indikator Kinerja 3 adalah **“Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti”**

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim Yang Ditindaklanjuti. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah penjelasan capaian output antara pada progress penyusunan rancangan kebijakan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan I yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan

Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Potensi ekonomi kelautan dan upaya mewujudkan nusantara sebagai poros maritim dunia tidak cukup hanya mengandalkan luasnya wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibutuhkan pula kondisi laut yang sehat yang tercermin dari optimalnya jasa lingkungan dan berkesinambungnya produk yang dihasilkan ekosistem lautan untuk 3 (tiga) hal utama, yaitu mencukupi kebutuhan dasar hidup manusia, memenuhi hajat hidup bangsa, dan menggulirkan roda perekonomian negara. Geostruktur daratan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil beserta aspek sosio-kultural yang terkait kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa juga harus dipertimbangkan dalam mengupayakan ekosistem laut nusantara yang sehat. Secara legal, jumlah kepulauan di Indonesia sebanyak 17.504 pulau. Dengan demikian, revolusi paradigma kelautan untuk kesejahteraan bangsa-negara beserta upaya kolaboratif yang terkoordinasi dapat diselenggarakan secara strategis dan inklusif, sekaligus mempertahankan ciri khas kebhinekaan Indonesia.
- Sampai saat ini potensi laut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha industri kelautan dan perikanan Indonesia. Kondisi demikian disebabkan masih rendahnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan industri kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pertumbuhan industri perikanan yang telah memanfaatkan sumber daya ikan di beberapa wilayah telah berdampak pada penurunan hasil tangkap, hilangnya stok ikan ekonomis penting, kerusakan habitat ikan, pencemaran ekosistem, serta fenomena tangkap lebih akibat praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak sah, dan tidak dilaporkan. Pengelolaan ruang laut dan daratan yang tidak mempertimbangkan interkoneksi aliran air dan tekanan antropogenis juga telah menambah beban terhadap kesehatan ekosistem lautan. Menurunnya kualitas lingkungan laut dan kesehatan ekosistem pesisir, otomatis berdampak negatif terhadap kehidupan biota laut, proses-proses lingkungan yang penting mendukung kehidupan di dalam dan sekitarnya, serta pada akhirnya akan berujung pada hilangnya sumber daya dan menurunnya potensi kelautan dan perikanan.

- Untuk mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan laut dan terganggunya ekosistem laut sehat di nusantara, maka Presiden Ir. Joko Widodo telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menginisiasi kebijakan mengenai Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Pembentukan kementerian koordinasi tersebut merupakan keputusan yang tepat, karena pengelolaan manfaat, fungsi strategis dan upaya pelestarian laut sudah difasilitasi oleh beberapa kementerian teknis. Dengan adanya Kementerian Koordinator yang membidangi kemaritiman dan investasi, diharapkan upaya mempertahankan kualitas laut nusantara yang sehat dapat dimanfaatkan dan diselenggarakan secara berkelanjutan. Selain itu, Kemenko Maritim dan Investasi dapat mengoordinasikan dan bersinergi dengan baik dengan kementerian dan lembaga-lembaga lain yang terlibat. Dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia telah berkomitmen di berbagai organisasi International untuk dapat mendukung target global, salah satunya Sustainable Development Goals (SDG#14), perihal perlindungan laut. Target-target tersebut untuk memperlambat dampak pemanasan global, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengukur keberhasilan Indonesia dalam upaya menjaga sistem laut, diperlukan suatu alat penilaian yang dapat mengukur kondisi kesehatan laut Indonesia, terutama yang fokusnya menghasilkan informasi terkait kondisi laut Indonesia saat ini dan ke depannya

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Paparan Terintegrasi
- Pengusulan Penambahan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 124/D11 Tahun 2022
- Penyampaian Laporan Progres Perizinan Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut
- Penyusunan Berita Acara Perencanaan Penggelaran Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (Skltm) 20 Kv Yang Menghubungkan Desa Ilangata Barat Dengan Pulau Dudepo, Kab. Gorontalo Utara Oleh Pt Pln Gorontalo
- Penyampaian Rencana Pelaksanaan Hari Nusantara Tahun 2023

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah koordinasi yang baik dengan Timnas Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut serta peran aktif Pemda dalam pengajuan diri menjadi Tuan Rumah Hari Nusantara 2023.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah pengumpulan dan perhitungan data agregat IKLI dilakukan pada TW 3 dan 4, menunggu nilai parameter di rilis secara resmi oleh K/L terkait. Sehingga progres pada TW I dan II terkait perhitungan IKLI kurang optimal.

Tindak lanjut dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Monev terkait pelaksanaan proses bisnis penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut di Indonesia
- Penentuan Tuan Rumah Hari Nusantara Tahun 2023
- Pengumpulan data nilai parameter IKLI untuk perhitungan Nilai IKLI Agregat Tahun 2023

b) Rancangan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur perikanan tangkap adalah kumpulan fasilitas fisik dan sarana yang dirancang dan digunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan secara efektif, aman, dan efisien. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang bekerja secara bersama-sama untuk memfasilitasi proses penangkapan ikan, pemrosesan, pengolahan, dan distribusi hasil tangkapan. Salah satu komponen penting dari infrastruktur perikanan tangkap adalah pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan menjadi titik pusat kegiatan perikanan, di mana kapal penangkap ikan berlabuh, ikan diturunkan, dan proses pemrosesan awal dilakukan. Pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga, gudang penyimpanan, fasilitas pendingin, dan peralatan pengolahan ikan.

- Selain pelabuhan perikanan, infrastruktur perikanan tangkap juga mencakup pelabuhan penangkapan ikan yang berfungsi sebagai tempat nelayan berlabuh sebelum dan setelah melaksanakan penangkapan ikan. Di pelabuhan penangkapan ikan, terdapat fasilitas penyimpanan peralatan penangkapan ikan, tempat pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta fasilitas pemuatan dan pemindahan ikan ke dalam kapal. Peralatan penangkapan ikan juga merupakan bagian penting dari infrastruktur perikanan tangkap. Peralatan ini mencakup jaring, pancing, perangkap, dan alat tangkap lainnya yang digunakan oleh nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan. Infrastruktur yang tepat untuk penyimpanan, perawatan, dan perbaikan peralatan penangkapan ikan juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan.
- Infrastruktur perikanan tangkap juga mencakup fasilitas pengolahan ikan, di mana ikan yang ditangkap diolah dan diproses sebelum dijual ke pasar. Fasilitas pengolahan ikan dilengkapi dengan peralatan pemotongan, pembersihan, dan pengemasan ikan serta fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas ikan sebelum didistribusikan. Pusat penjualan dan pemasaran juga menjadi bagian dari infrastruktur perikanan tangkap. Pusat ini termasuk pasar ikan, pasar tradisional, dan fasilitas khusus yang mendukung perdagangan dan distribusi hasil tangkapan ikan baik secara lokal maupun internasional. Fasilitas ini memainkan peran penting dalam menghubungkan nelayan dengan konsumen serta memfasilitasi pemasaran ikan yang segar dan berkualitas. Infrastruktur perikanan tangkap juga mencakup pusat penelitian dan pendidikan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perikanan tangkap. Lembaga ini melakukan penelitian, pelatihan, dan pendidikan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, dan inovasi.
- Beberapa masalah yang sering muncul dalam infrastruktur perikanan tangkap antara lain
 - Usia dan kondisi pelabuhan: Banyak pelabuhan perikanan tangkap di dunia yang sudah tua dan membutuhkan perbaikan. Kekurangan peralatan dan fasilitas yang memadai dapat menghambat efisiensi operasional;

- Kapal penangkap ikan: Beberapa daerah masih menggunakan kapal penangkap ikan yang usang dan kurang efisien. Kapal yang tidak memenuhi standar keamanan atau tidak dilengkapi dengan peralatan tangkap yang tepat dapat menyebabkan kerugian sumber daya perikanan dan berdampak negatif pada lingkungan;
- Infrastruktur pengolahan dan penyimpanan: Fasilitas pengolahan ikan yang terbatas atau kurang modern dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan ikan yang ditangkap. Sistem penyimpanan yang buruk juga dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian stok ikan; dan
- Akses ke pasar: Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik dapat menghambat akses pasar bagi produk perikanan. Jarak yang jauh antara tempat penangkapan dengan pasar dapat mempengaruhi kesegaran dan kualitas ikan yang dijual.
- Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh banyak negara. Investasi dalam perbaikan fasilitas pelabuhan, modernisasi kapal penangkap ikan, pengembangan fasilitas pengolahan dan penyimpanan, serta perbaikan sistem logistik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan tangkap.

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam Kunjungan Kerja Ke Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Skpt Natuna Dan Pelabuhan Perikanan Balerang Provinsi Kepulauan Riau

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah Kasal TNI mendukung pengembangan pelabuhan SKPT Natuna. Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah adanya konflik kepentingan lokasi SKPT dan pangkalan TNI terpadu di SKPT Natuna. Tindak lanjut dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sudah dicapai kesepakatan dalam pengembangan SKPT Natuna.

c) Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020, Komoditas ekspor hasil perikanan meliputi udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Udang menjadi komoditas ekspor hasil perikanan paling tinggi secara volume maupun nilai pada tahun 2020 dengan volume sebesar 239.282011 kg dan nilai sebesar USD 2.040.184.255.
- Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, udang mengalami kenaikan volume ekspor rata-rata sebesar 8.70%, Tuna-Cakalang-Tongkol naik sebesar 10.95%, rumput laut naik sebesar 1.15%, Cumi Sotong-Gurita naik sebesar 4.21%, Rajungan-Kepiting turun sebesar 1.08% dan komoditas lainnya naik sebesar 2.90% pertahun.
- Pemerintah sedang berupaya melakukan peningkatan nilai produksi udang melalui peningkatan produksi dan value added (nilai tambah). Produksi udang ditingkatkan melalui intensifikasi melalui upaya peningkatan produktivitas tambak dengan peningkatan teknologi secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi yakni dilakukan perluasan areal tambak pada kawasa-kawasan potensial dengan mencetak tambak baru beserta fasilitas pendukungnya seperti saluran pemasukan dan pembuangan air, akses jalan dan jembatan, jaringan listrik dan air bersih dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan kawasan pesisir.
- Dalam rangka mewujudkan program revitalisasi tambak udang dan juga akselerasi produktivitas udang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Lembaga lainnya telah menyusun "Crash Program Revitalisasi Tambak, Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang tahun 2020-2024 serta Buku Panduaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Tambak Udang". Pedoman ini akan dijadikan acuan dalam melakukan Pengendalian terhadap Kebijakan Akselerasi Produksi Dan Revitalisasi Tambak Udang

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Hasil Fgd Revitalisasi Tambak Di Kab. Sidoarjo Dengan Penerapan Building With Nature

- Pelaksanaan Bangka Belitung Shrimp Conference dan Kunjungan Lapangan tambak di Bangka Tengah
- Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Dan Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Program Dan Tantangan Peningkatan Produksi Udang Di Jawa Timur
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pertambakan Udang Di Karimunjawa
- Pelaksanaan KOORDINASI DAN KUNJUNGAN LAPANGAN Pengembangan Perikanan Budidaya Di Kab. Sumba Timur
- Pelaksanaan Rapat Tim Pengarah Dan Tim Pakar Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Salah satu Program Strategis KKP yakni Pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, yang mana Udang menjadi salah satu komoditas unggulan untuk upaya tersebut.
- Didalam Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah adanya Penetapan Kebijakan, Program dan Anggaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dinamis, selain itu, dukungan yang diberikan relatif masih minim.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Telah dicapai kesepakatan terkait lokus pertambakan yang akan direvitalisasi

d) Rancangan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sistem logistik merupakan salah satu rantai penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Saat ini industri kelautan dan perikanan masih menghadapi

tantangan dan permasalahan dalam daya dukung sistem logistik dari hulu sampai ke hilir. Walaupun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) namun dunia usaha kelautan dan perikanan masih menghadapi permasalahan biaya efisiensi biaya logistik. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BUMN, dan swasta belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking timeline 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (ranking 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vitenam, dan Malaysia).

- Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan cold storage, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat.
- Dalam upaya turut meningkatkan kinerja sistem logistik produk perikanan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan maka Asistem Deputy Peningkatan Daya Saing pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian terhadap isu-isu faktual yang terjadi di lapangan guna mendukung arah kebijakan dan strategi logistik perikanan yang terkait dengan pemetaan dan pemantauan implementasi sistem telusur dan informasi logistik ikan, penataan tata niaga dan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan distribusi dan penyediaan jasa logistik hasil kelautan dan perikanan dan penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan.

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melakukan upaya-upaya yang aktual dan komprehensif maka Asiten Deputi Peningkatan Daya saing menyajikan rumusan rekomendasi kebijakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rantai pasok dingin produk kelautan dan perikanan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan energi terbarukan (EBT) yang kegiatannya dilakukan dalam rangkaian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Federal Jerman dalam proyek Pembangunan Rantai Dingin Tenaga Surya Untuk Ekonomi Hijau atau Solar Cold Chains for a Green Economy (SOCOOL) melalui lembaga Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian Pelaksanaan n Rapat Koordinasi Teknis Usulan Pengembangan Industri Perikanan Modern di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perkembangan Pembahasan Draft Implementation Agreement (IA) Proyek Solar Cold Chains for a Green Economy in Indonesia (SOCOOL)

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Draft Final Perjanjian Kerja Sama Teknis antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dengan GIZ
- Laporan Hasil Pembahasan Rencana Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai Hub Udara Logistik
- Laporan Hasil Rapat Pengembangan Industri Perikanan Modern Kabupaten Tambrauw
- Telah dilakukan Pembahasan Konsolidasi Muatan Ekspor dari 4 (empat) Kabupaten (Biak, Yapen, Waropen, dan Sarmi) pada tanggal 31 Maret 2023
- Evaluasi Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Nasional

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Belum Finalnya Draft IA di internal ke deputian 2
- Belum mengajukan surat ke Menko untuk pendelegasian wewenang Deputi menandatangani IA
- Belum menyampaikan dratf final IA ke pihak GIZ

- Belum tersepekatinya lokasi pelayanan 1 atap di Bandara IGNR antara Otban (Kemenhub) dan Karantina (KKP)
- Anggaran pembangunan fasilitas perikanan modern yang belum turun dalam tahun ini
- Perlu kajian mendalam sebagai syarat teknis pembangunan ICS dari KKP
- Perlu dukungan anggaran untuk pembangunan logistik fasilitas rantai dingin di 3 Kabupaten
- Perlu membuka Biak sebagai gerbang Ekspor direct call

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan rapat internal tingkat Esselon II di lingkup Deputi 2 untuk menyepakati draft final IA
- Segera mengajukan surat pendelegasian wewenang ttd Deputi ke Menko
- Segera menyampaikan usulan drfat IA ke pihak GIZ"
- Melakukan rapat koordinasi teknis dan mencari solusi untuk mencapai kesepakatan
- Perlu merencanakan Kunjungan Lapangan Bersama lintas instansi dan workshop di lokasi Kab Tambraw
- Membuat kajian Potensi Perikanan di Kab Tambrau
- Akan diadakan rapat koordinasi teknis lintas kementerian pada tanggal 12 Mei 2023
- Akan diadakan rapat pada pertengahan bulan mei 2023

e) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan dimana salah satunya

adalah tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Internasional yang semakin meningkat serta adanya kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor seperti adanya temuan logam berat, salmonella, histamin, decompose dan lain-lain. Jika tidak segera ditangani maka dapat berdampak negatif dalam upaya pencapaian target ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Data BKIPM-KKP tahun 2022 menunjukkan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) sekitar 863 UPI yang telah memiliki sertifikat Hazard Analytical Control Point (HACCP) dengan ruang lingkup produk sebanyak 2.951 jenis produk. Akseptabilitas atau keberterimaan hasil produk perikanan Indonesia di pasar dunia adalah mencapai 158 negara dari 241 negara di dunia (195 negara anggota PBB) dengan pasar potensialnya adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan Australia. Terkait dengan Tuntutan Jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan oleh Internasional diketahui bahwa setiap negara tujuan ekspor/buyer memiliki berbagai aturan persyaratan standar mutu yang harus dipenuhi oleh eksportir. Negara eksportir selain harus memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan yang ditunjukkan melalui sertifikasi implementasi penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan maka di beberapa negara tujuan ekspor membutuhkan bukti terkait persyaratan mutu tambahan yakni penggunaan teknologi Iradiasi.

- Teknologi iradiasi merupakan metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik patogen
- Prinsip Iradiasi pada Produk Perikanan adalah tidak ditujukan untuk memperbaiki mutu dan keamanan hasil perikanan namun berfungsi sebagai inaktivasi bakteri vegetatif patogen (Salmonella, Shigella, Vibrio, Listeria) serta dapat memperpanjang masa simpan.
- Saat ini di Indonesia baru terdapat 2 fasilitas iradiator gamma dan jauh tertinggal dari negara Tiongkok yang memiliki 27 dan India yang memiliki 17 fasilitas iradiator gamma (Batan 2015). Beberapa analisis yang menyebabkan masih rendahnya fasilitas Iradiator di Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Sarana Fasilitas masih mahal
 - Pemahaman konsumen masih rendah

- Edukasi/Sosialisasi masih kurang masiv dijalankan
- Jumlahnya masih terbatas sehingga belum banyak diaplikasikan pada industri pangan Indonesia
- Beberapa pertimbangan perlunya teknologi Iradiasi dikembangkan di Indonesia adalah: a. Regulasi telah tersedia b. Teknologi dan SDM tersedia c. TKDN 80 % d. Aman, tidak residu e. Efisien dan Efektif f. Bersifat Multi Fungsi

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah adanya komunikasi yang intens dengan Pelaku Riset Teknologi Iradiator.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Kasus penolakan negara buyer
- Jumlah Fasilitas Iradiator untuk skala industri di Indonesia masih kurang yakni hanya 3 di lokasi yang kurang strategis (serpong dan cibitung)
- Pengadaan Fasilitas Iradiasi Mahal (90-120 M) dan perlu dilakukan feasibility study
- Audiensi belum dilaksanakan berhubung waktu yang telah diagendakan selalu berubah.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan dilaksanakan kunjungan lapangan pada fasilitas Iradiasi di Serpong dan Surabaya yang memiliki model sumber Iradiasi isotop yang berbeda (Cobalt 60, X-ray dan E-Beam)
- Akan membuat kajian rencana pengembangan teknologi Iradiasi di 3 lokasi sentra produksi perikanan strategis (Bitung, Belawan dan Surabaya)

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang

Terintegrasi. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan data KKP bulan Desember 2022, nilai ekspor perikanan bulan Januari – November 2022 mencapai 5,07 milyar USD dan diperkirakan tumbuh 8,84% atau sekitar 6,22 milyar USD pada akhir tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai 1.997,49 juta USD, Tuna-Cakalang-Tongkol senilai 865,73 juta USD, Cumi-Sotong Gurita sebesar 657,71 juta USD, Rumput Laut sebesar 554,96 juta USD dan Rajungan-Kepiting sebesar 450,55 juta USD. Komoditas-komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat senilai 2,15 milyar USD (37,63%), Tiongkok 1,02 miliar USD (17,90%), Jepang 678,13 juta USD (11,89%), ASEAN 651,66 juta USD (11,42%) serta 27 negara Uni Eropa senilai 357,12 juta USD (6,26%).
- Sasaran pada indikator pertumbuhan PDB perikanan adalah untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, lalu kemudian sasaran pada indikator peningkatan konsumsi ikan dan ketersediaan protein adalah untuk meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan.
- Indikator sarana dan prasarana pengawasan karantina, sistem jaminan kesehatan ikan dan asuransi usaha budidaya mendukung sasaran terkait peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan dan sasaran pada indikator nilai ekspor hasil perikanan adalah untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
- Data BKIPM-KKP tahun 2020 menyatakan akseptabilitas atau keberterimaan hasil produk perikanan Indonesia di pasar dunia adalah mencapai 158 negara dari 241 negara di dunia (195 negara anggota PBB) dengan pasar utamanya adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan Australia. Terkait dengan hasil inspeksi negara mitra, terdapat 6 negara mitra Indonesia dalam ekspor produk kelautan dan perikanan yakni Uni Eropa, Korea, China, Rusia, Kanada dan Vietnam. Sementara negara Non Mitra antara lain adalah Jepang, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Taiwan dan lain-lain.

- Seiring dengan meningkatnya permintaan produk perikanan Indonesia dari dunia internasional, aktivitas ekspor pun semakin meningkat. Agar setiap produk perikanan dari Indonesia bisa terjamin mutunya, salah satu cara adalah dengan meningkatkan jaminan mutu produk perikanan melalui sertifikasi mutu, penerapan ketertelusuran (traceability), serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara kelembagaan maupun dengan penerbitan peraturan. 2 Dalam melaksanakan prinsip ketertelusuran yang menjadi kunci dari jaminan mutu produk perikanan, prosesnya meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan

Latar Belakang Tersebut Disusun Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sdm Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Dalam Mendukung Mutu Ekspor Produk Kelautan Dan Perikanan Dan Koordinasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu, Keamanan Produk Kelautan Dan Perikanan Pada Lingkup Perikanan Tangkap

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah adanya Rapat Koordinasi offline terkait Rencana Pembuatan Standarisasi Kompetensi dan Kapasitas Petugas Mutu pada lingkup Pelabuhan Perikanan (PP). Dihadiri oleh Perwakilan Kepala Pelabuhan Perikanan (PPS, PPN, PPP dan PPI) yang ada di sepanjang wilayah Pantura Pulau Jawa.

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah personil mutu di Pelabuhan Perikanan kurang
- Kompetensi Personil Mutu di Pelabuhan Perikanan kurang
- Peta Sebaran Personil Mutu di Pelabuhan Perikanan kurang proporsional
- Tugas Rangkap
- Mutasi Kerja
- Pelatihan Kurang

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah akan dilaksanakan Rakor lanjutan dan kunjungan lapangan pada PP di wilayah Barat, Tengah dan Timur guna mendapatkan data informasi yang lebih konkrit.

g) Rancangan Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber penghidupan bagi jutaan nelayan maupun sebagai sektor ekonomi yang strategis. Namun, meskipun memiliki potensi besar, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam pengembangan pemasaran produk-produk kelautan dan perikanan. Beberapa latar belakang kebijakan yang menjadi dasar pengembangan pemasaran produk kelautan dan perikanan di Indonesia antara lain:

- Diversitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki keragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, termasuk berbagai jenis ikan, udang, kerang, rumput laut, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar sumber daya ini belum dimanfaatkan secara optimal dan belum dikenal secara luas di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengembangkan pemasaran produk kelautan dan perikanan guna memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah bagi sektor ini.

- Potensi Pasar yang Luas

Permintaan akan produk kelautan dan perikanan terus meningkat baik di dalam maupun luar negeri. Konsumen semakin menyadari manfaat gizi dan kesehatan yang terkandung dalam produk kelautan dan perikanan, sehingga permintaan terhadap produk-produk tersebut meningkat. Dengan demikian, kebijakan pengembangan pemasaran produk kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi penting agar dapat memenuhi permintaan pasar yang luas, baik domestik maupun internasional.

- Potensi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Sektor Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat pesisir. Pengembangan pemasaran

produk kelautan dan perikanan akan membantu meningkatkan nilai tambah 4 produk, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan pendapatan nelayan serta pelaku usaha di sektor ini. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan pengurangan kemiskinan.

- Perlindungan dan Keberlanjutan Sumber Daya Laut

Pengembangan pemasaran produk kelautan dan perikanan juga berkaitan dengan perlindungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Dalam mengembangkan pemasaran produk, perlu diperhatikan aspek keberlanjutan agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kebijakan pengembangan pemasaran juga dapat mendorong praktik tangkap ikan yang berkelanjutan, budidaya ikan berkelanjutan, dan pengelolaan yang baik terhadap ekosistem laut.

- Potensi Ekspor dan Promosi Internasional

Produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk diekspor ke pasar internasional. Dengan pengembangan pemasaran yang baik, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar global, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan devisa negara. Promosi internasional yang efektif juga dapat memperkuat citra positif produk kelautan dan perikanan Indonesia di mata dunia.

- Berdasarkan latar belakang tersebut, kebijakan pengembangan pemasaran produk kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi sektor ini, meningkatkan nilai tambah produk, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya perlindungan dan keberlanjutan sumber daya laut serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan global

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian Pelaksanaan Rapat Persiapan Ekspor Perikanan Tangkap untuk Katering Haji 2023 dan Pelaksanaan Permohonan Dukungan NUSATIC 2023

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlunya dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk pemenuhan ikan layur guna pelaksanaan rencana ekspor oleh PT Perindo,
- Kurangnya kapasitas ABF dan Cold Storage.
- Perlu tambahan kuota BBM subsidi;
- Perlu ada konsolidasi produk kp dari 3 kabupaten lain yang menjadi tuan rumah Sail Teluk Cenderawasih.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemetaan kerjasama antara Kemenko Marves dan PT Perindo terkait peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi serta Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru guna penyiapan rencana ekspor ikan layur."
- Penyusunan Nota dinas kepada Bapak Menko Marves serta surat dukungan terhadap NUSATIC 2023 telah disiapkan dan sedang berproses
- Dinas Perikanan Kab. Sukabumi dan Koperasi Nelayan Berdaulat Ciwaru akan bersurat kepada KKP terkait permohonan penambahan kapasitas CS dan ABF.
- Pelaksanaan Rakor lanjutan untuk pemetaan potensi perikanan dan kelautan di kabupaten lokasi Sail Teluk Cenderawasih, dan pemerintah daerah sedang menyiapkan surat permohonan kepada Pertamina terkait tambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan

h) Rancangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan impor garam saat ini dilakukan untuk memasok kebutuhan garam jenis industri yang memiliki kualitas khusus, dimana garam lokal dianggap belum mampu memenuhi konsistensi kebutuhan tersebut. Tahun 2021 dengan kebutuhan garam yang dipenuhi melalui mekanisme impor adalah 2.851.005,83 ton dan yang dipenuhi melalui kebutuhan dalam negeri adalah 1.063.086,27 ton. Pada tahun 2022 pemenuhan garam melalui kontribusi garam lokal diprediksi

dan ditargetkan pada angka 1.500.000 ton dengan pemenuhan impor dialokasikan sejumlah 2.915.646 ton.

- Ketidakmampuan produksi garam dalam negeri untuk menutup mayoritas kebutuhan nasional menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing produksi. Selain akibat adanya pengaruh La Nina yang menyebabkan musim basah lebih panjang, rendahnya produksi dalam negeri juga salah satunya diakibatkan oleh rendahnya adopsi teknologi yang dilakukan oleh produsen nasional. Sejauh ini terdapat tiga unsur produsen garam nasional, yaitu petambak garam, PT Garam (BUMN), dan BUMS yang lahannya berada di lahan program ekstentifikasi di Nusa Tenggara Timur.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan dalam melakukan pengendalian kebijakan terhadap tata kelola pergaraman nasional. Peran tersebut dikuatkan dengan terbitnya 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Kemenko Marves diamatkan untuk mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional. Dalam mendukung terwujudnya target pergaraman nasional guna memenuhi kebutuhan garam nasional, perlunya pengendalian sektor hulu hingga hilir meliputi tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran. Pada aspek regulasi saat ini perlunya mendorong peraturan turunan pelaksana dari Perpres No. 126 Tahun 2022 guna mendukung implementasi percepatan pembangunan pergaraman nasional.
- Adapun sebagai keluaran kebijakannya diharapkan tersedianya inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional. Pada dokumen naskah kebijakan ini, disampaikan rumusan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung tersedianya inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional.

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Penyampaian Bahan Rakor Menko Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres 126/2022).
- Pelaksanaan Rakor Pembahasan Dokumen Awal RPermenko Marves Tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyesuaian Rencana Aksi P3N

- Menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksana Perpres 126 perihal Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N)
- Penyusunan Rencana Penyelesaian Isu Perpres 126 Tahun 2023 perihal Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N) pada TW I
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Finalisasi Progres Capaian Rencana Aksi pada Lampiran Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N) Waktu Pelaksanaan Tahun 2022
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Finalisasi RPermenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dan Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Progres Capaian Rencana Aksi Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N)

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah adanya Rpermenko yang merupakan peraturan pelaksana dari Perpres No.126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut akan dilakukan permohonan persetujuan Presiden dan Pengundangan oleh Marves.

i) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usaha

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usaha adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usaha. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan diversifikasi produk otomatis memposisikan industri pengolahan perikanan menjadi sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Industrialisasi perikanan tentu memerlukan sinergi industri perikanan dari hulu sampai hilir agar bersama-sama dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi Indonesia yang konsumsi ikan masyarakatnya masih rendah dibanding negara maju, kehadiran industri pengolahan produk perikanan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi pasar ekspor. Karena itu untuk bisa bersaing di pasar internasional perlu didorong dan dikembangkan agar bisa menghasilkan produk

yang memiliki mutu yang baik, aman dikonsumsi, tersedia secara berkesinambungan, berdaya saing secara ekonomis, serta sesuai dengan selera masyarakat dengan menjaga kualitas produk sesuai standar mutu yang berlaku.

- Adanya pengembangan hilirisasi produksi perikanan dengan meningkatkan output industri pengolahan produk perikanan diharapkan dapat menjadi motor utama penggerak produktivitas di sektor perikanan serta dapat berkontribusi bagi sektor lainnya dalam perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar peranan industri pengolahan produk perikanan dalam perekonomian Indonesia. Secara nasional, proses industrialisasi ini sangat penting karena industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja. Usaha kecil merupakan bagian dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peran pentingnya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan.
- Usaha kecil dan menengah diharapkan dapat menjadi industri yang profit dan sanggup mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling bertahan dalam kondisi krisis.
- Sektor UMKM merupakan salah satu industri yang dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional salah satu di dalamnya yaitu UMKM. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan sektor UMKM tanpa bantuan pemerintah.
- Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas rumput laut melalui hilirisasi industri. Sebab, rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan yang berpeluang dikembangkan di dalam negeri karena ketersediaannya masih cukup besar dan mampu menggerakkan sektor ekonomi di wilayah pesisir.
- Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan rumput laut di tanah air. Selain dibutuhkan

berbagai kebijakan strategis, juga perlu koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai sasaran tersebut.

- Kemenko Marves juga perlu terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian dalam rangka paya peningkatan hilirisasi komoditas rumput laut melalui diversifikasi produk olahan rumput laut, serta mendorong kerja sama riset dan pengembangan produk olahan rumput laut dengan lembaga riset dalam dan luar negeri
- Kebijakan hilirisasi industri rumput laut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama bagi nelayan budidaya dan petani rumput laut bahkan industri berbasis agro ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, seperti dari hasil capaian ekspornya.
- Ekspor produk olahan rumput laut berupa karagenan dan agar-agar mencapai 14 ribu ton atau senilai USD 96,1 juta pada tahun 2020. Pangsa pasar olahan rumput laut yang cukup besar merupakan peluang bagi Indonesia untuk memacu ekspor, terutama apabila dapat meningkatkan volume produksi dan daya saing produk.
- Indonesia merupakan negara eksportir karagenan ke-6 di dunia dan negara eksportir agar ke-7 di kancah global. Negara tujuan ekspor produk olahan rumput dari Indonesia antara lain ke China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.
- Kekuatan pengembangan produk olahan rumput laut di tanah air diantaranya didukung dari produksi rumput laut kering yang mencapai 364 ribu ton per tahun, serta ditopang sekitar 40 industri pengolahan rumput laut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan total kapasitas sebesar 64,9 ribu ton per tahun.
- Indonesia telah memiliki roadmap Industri Rumput Laut Nasional, kemudian Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia dan penambahan lahan budidaya rumput laut masih terbuka. Hal tersebut merupakan potensi yang harus dioptimalkan. Selain itu, guna mendorong daya saing, Pemerintah perlu mendorong industri dan memanfaatkan teknologi terkini, melakukan hilirisasi produk, membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) industrinya, dan menumbuhkan wirausaha baru atau industri kecil dan menengah (IKM) berbasis rumput laut.

- Kebijakan hilirisasi diharapkan semakin memperkuat peranan sektor industri dalam perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditambah dukungan dengan deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilakukan pemerintah.
- Dalam rangka mendukung tercapainya kebijakan pengembangan industri perikanan dan jaminan usahanya melalui fasilitasi pengembangan hilirisasi industri rumput laut bagi UMKM, Kemenko Marves mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha UMKM industri rumput laut dalam mengembangkan dan melakukan diversifikasi produk guna meningkatkan nilai tambah dengan dukungan koordinasi terkait kebijaksanaan/regulasi dengan K/L terkait

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan Audiensi Pelaku Usaha Pengolah Rumput Laut dan pelaksanaan Kunjungan Lapangan Ke Rumah Rumput Laut (RRL)

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Diskusi Bersama Stakeholder Terkait Dukungan Perencanaan Industrialisasi Rumput Laut dan Rakor identifikasi bersama KKP di Kepulauan Riau
- Adanya inovasi pembuatan reefer container buatan dalam negeri dengan sumber energi panel surya oleh PT Delima Makmur serta akan dilakukan uji coba pemanfaatannya pada sentra-sentra industri perikanan

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan bahan baku rumput laut belum stabil (belum tersedia sepanjang tahun)
- Pemasaran dan penggunaan oleh pelaku usaha industri dalam negeri masih terbatas

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya dan pengembangan diversifikasi produk rumput laut di Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah (KKP) dan stakeholder terkait

- Uji coba pemanfaatan reefer container portable dengan sumber energi panel surya pada sentra industri perikanan

j) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman adalah Draf Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Arah riset dan inovasi nasional mengalami transformasi total sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melebur lembaga-lembaga riset dan balitbang. Total 39 lembaga penelitian dan pengembangan diintegrasikan ke BRIN, diantaranya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Peleburan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 dan disempurnakan pada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam menentukan arahan pembangunan guna memperkuat ekosistem riset dan inovasi kedepan terdapat tujuh target yang ditetapkan oleh BRIN guna mendukung Indonesia Maju yaitu

1. Mengintegrasikan lembaga riset pemerintah, yang telah berjalan sejak tahun 2021
2. Melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk mempercepat peningkatan *critical mass* sumber daya riset dan inovasi
3. *Refocusing* pada riset yang meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan keanekaragaman serta mengejar ketertinggalan Iptek
4. Menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian berbasis sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman lokal kita, baik itu hayati, geografi, maupun seni budaya
5. Fasilitasi dan *enabler* industri nasional yang melakukan pengembangan produk berbasis riset, serta menciptakan industri berbasis riset yang kuat dalam jangka panjang

6. Menjadi *platform* penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan dan *entrepreneur* berbasis inovasi Iptek
7. Meningkatkan dampak ekonomi langsung dari berbagai aktivitas riset dan menjadikan sektor Iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang dan penarik devisa bagi Indonesia.
8. Menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset dan inovasi yang kuat, serta berkesinambungan dengan memfokuskan pada *Digital Green Blue Economy*.

Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi. Lalu peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas rencana induk riset nasional, yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Dalam Mendorong Kebijakan

Jika dilihat dari skor Global Innovation Index (GII) tahun 2020, Indonesia memiliki nilai 26,49 yang artinya Indonesia berada di peringkat 85 dari 126 negara. Untuk itu, penciptaan ekosistem inovasi sangat penting dilakukan, dimana hasil riset-riset inovasi yang belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial terus diperkuat. Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi. Lalu peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas rencana induk riset nasional, yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. Peran Kemenko Marves dalam mendukung kebijakan ini yaitu mendorong kolaborasi n-Helix yang melibatkan pihak-pihak akademisi, pemerintah, industri, asosiasi dan pemangku kepentingan yang lain sebagaimana terlampir pada deskripsi isu.

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Pelaksanaan rapat pembahasan perpanjangan implementing arrangement (IA) The Establishment and Operations of The Marine Technology Cooperation Research Center
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2023 di Lingkungan Kemenko Marves

- Pelaksanaan KEGIATAN 2ND KOREA-INDONESIA BLUE CARBON EXPERT WORKSHOP
- Penandatanganan MoU antara Universitas Udayana dan Korea-Indonesia untuk Kerjasama Akademik dan Penelitian

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerjasama Riset Kemaritiman Melalui Lembaga MTCRC
 - perpanjangan draf pengaturan pelaksanaan (PP)/ Implementing Arrangement (IA) pendirian dan pengoperasian Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC).
 - - ND Laporan perpanjangan IA MTCRC
 - - Surat MTCRC ke Plt Deputi SDM terkait perpanjangan IA
 - - Surat Plt. Deputi SDM ke Ministry Ocean and Fisheries Republic Of Korea
 - Persiapan Blue Carbon Project
 - - Persiapan pelaksanaan 3rd Blue Carbon Expert Workshop
 - - Surat Deputi ke Bappenas, Bappenas ke Pemerintah Korea terkait Pengusulan Blue Carbon Enhancement Project
 - c. Joint Committe antara Pemerintah Indonesia dan Korea
 - - Joint Commission 4 dan 5 dilaksanakan desk to desk di tandat tangani oleh Deputi Kementerian kedua Negara
 - - Joint Commision 6 dilaksanakan secara luring dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Korea (Deputy Minister MOF, KIOST dan 2 Universitas Korea)
 - d. Persiapan Project Integrated Capacity Building
 - - Fasilitasi pertemuan MTCRC ke BPSDM, kunjungan ke Ancol dan Bali dalam rangka peninjauan fasilitas pendukung ODA Project ini
 - - Persiapan MoU antara MTCRC dan BPSDM KKP yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023
 - - Drafting IA project yang rencananya akan dilaksanakan di Korea pada akhir Juni 2023
 - e. fasilitasi platform lembaga MTCRC dengan insitusi pendidikan di Indonesia
 - - telah ditandatangani MoU antara MTCRC dan Udayana, menyusul MoU dengan beberapa Universitas lain Seperti Unhas, IPB dan Unpatti
 - - Penjajakan MoU dengan beberapa perguruan tinggi lain seperti UNDIP, UGM dan UI

Kendala dalam pelaksanaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Perubahan nomenklatur Kemenko Maritim menjadi Kemenko Marves dari sisi hukum maka IA harus disusun dan dilakukan pembahasan ulang. Selain itu adanya perubahan struktur organisasi di MOF Korea, maka dari Pemerintah Korea juga meminta waktu untuk menganalisis dokumen IA
- Agar tidak terjadi kekosongan legal standing lembaga MTCRC, maka pemerintah Indonesia mengirimkan surat 'express' letter ke Pemerintah Korea yang berkeinginan memperpanjang IA MTCRC. Ketersediaan bahan baku rumput laut belum stabil (belum tersedia sepanjang tahun)

Tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan Official letter dari Plt. Deputi SDM ke MOF Korea terkait perpanjangan IA MTCRC
- Mengirimkan surat resmi pengajuan proposal project blue carbon melalui Bappenas untuk diteruskan ke Embassy of Republic Korea

k) Rancangan Kebijakan Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan adalah Draft Bab I (Latar Belakang) Kebijakan Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan. Latar belakang yang disusun atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bangsa Maritim, sejatinya merupakan identitas atau karakter utama bagi bangsa Indonesia, karena lahir dan eksistensi negara ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebesaran dan kejayaan maritim para leluhurnya, dan juga fakta geografis wilayahnya yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam realitasnya, pencapaian-pencapaian keberhasilan di bidang kemaritiman masih belum menjadi hal atau citra yang menonjol dan terdepan bagi bangsa Indonesia. Baik dalam hal mengelola sumber daya laut, menata ruang laut, memajukan ekonomi kelautan, melestarikan lingkungan laut, mengembangkan bangunan dan instalasi di wilayah laut, mengefektifkan transportasi laut, hingga merawat adat dan budaya maritim, dapat dikatakan masih belum sesuai harapan.
- Terdapat 5 bidang penting yang mendapat manfaat dari investasi dalam aksi iklim berbasis laut untuk menciptakan ekonomi biru, yaitu:

- Sumber energi terbarukan maritim, dapat membantu dalam membangun kemandirian energi dan membantu negara-negara memenuhi komitmen pengurangan emisi mereka di bawah Perjanjian Perubahan Iklim Paris;
- Dekarbonisasi pengiriman global. Jika sektor industri ini adalah sebuah negara, itu akan menjadi yang terbesar kedelapan di dunia dalam hal emisi karbon. Kabar baiknya adalah bahwa teknologi yang muncul dapat sangat mengurangi emisi dari kapal dan fasilitas pelabuhan.
- Lahan basah dan ekosistem pesisir – seperti rawa asin, padang lamun, terumbu karang dan hutan bakau – membutuhkan perlindungan mendesak untuk mempertahankan jasa lingkungan kritisnya. Diperkirakan bahwa ekosistem ini menyerap sebanyak lima kali jumlah karbon seperti hutan terestrial per satuan luas sambil melindungi populasi pesisir dari badai yang semakin kuat dan kenaikan permukaan laut;
- Berinvestasi dalam perikanan yang berkelanjutan dan, khususnya, akuakultur akan menciptakan pekerjaan dengan gaji yang baik dan membantu mempromosikan ketahanan pangan dan keadilan ekonomi.
- Pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif dapat membentuk blok bangunan penting dalam memastikan pemulihan ekonomi yang langgeng bagi negara-negara pesisir dengan cara yang mendukung laut dan alam – dan banyak orang yang bergantung padanya.
- Dalam mencapai Visi RPJMN 2020–2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Latar belakang tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan dan Rencana Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Janji Presiden, PSN dan Major Project Bidang Kemaritiman dan Investasi Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Pelaksanaan Koordinasi Indonesia Government Collaboration – OceanX, G42, Gtech
- Pelaksanaan Koordinasi Kolaborasi Peningkatan Kapasitas, Media, dan Edukasi Publik
- Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Kerja Sama Riset Kelautan, Teknologi dan Pengembangan Kapasitas antara Pemerintah Indonesia dengan Ocean X
- Pelaksanaan Kunjungan Koordinasi Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Pengembangan Maritime National Artificial Intelligence Platform
- Penyampaian Progres Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama OceanX

4. Indikator Kinerja 4 adalah **“Persentase isu-isu Strategis yang Diselesaikan”**

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian isu-isu strategis yang ditargetkan selesai pada Tahun 2023. Sesuai PK, terdapat 9 Isu Strategis pada Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023. Berikut adalah daftar isu strategis dan kriteria keberhasilannya:

No	Isu Strategis	Kriteria Keberhasilan
1	Koordinasi Penyelesaian Rencana Zonasi	Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau Perpres RTR KSN/RZKAW
2	Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S	Mendorong terselesaikannya Studi Pendahuluan untuk Pendanaan Blue Halo S
3	Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara	Mendorong Penyelesaian Pembangunan Ibu Kota Sofifi
4	Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang	Ditindaklanjutinya Kegiatan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang
5	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk KP ke China	Terselesaikannya kendala ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Tiongkok
6	Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX	Ditindaklanjutinya Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX
7	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20	Didorongnya Kerja Sama Ocean 20 sebagai Forum Kelautan Global G20
8	Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit	1. Terlaksanakannya rekonsiliasi data sehingga Satgas memiliki 1 database yang menjadi acuan 2. Terlaksanakannya Self Reporting 3. Upaya implementasi UUCK Pasal 110A dan 110B

Kriteria keberhasilan tersebut dipecah menjadi target-target sebagai output antara yang dicapai setiap triwulannya. Berikut adalah laporan proses dan capaian sementara dari isu-isu strategis lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023:

a) Koordinasi Penyelesaian Rencana Zonasi

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi penyelesaian rencana zonasi, output antara yang telah dilaporkan adalah telah terdapat masukan tertulis terhadap dokumen final/materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Kalimantan Selatan.

Sebagai data dukung dari capaian tersebut telah dilaksanakan proses permintaan paraf pada Naskah Rancangan Perpres tentang RZKAW Laut Flores dan RZKAW Selat Malaka. Proses tersebut dilakukan berjenjang dari Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sekretaris Negara.

Kendala dalam capaian output antara tersebut adalah pada tahapan legalisasi Rperpres, Kemenko Marves.

b) Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi pelaksanaan Blue Halo S, output antara yang disampaikan adalah adanya kesepakatan dalam pembentukan komite teknis hibah konservasi alam dan perikanan lestari (Blue Halo S) yang mana hal-hal yang terkait adalah sebagai berikut:

- SK Komite Teknis diperkirakan untuk ditetapkan pada Juni 2023.
- Pemetaan fungsi dan peran sudah memperoleh masukan dan sudah disesuaikan.
- Usulan tambahan anggota sudah disepakati. Jika ada penambahan kembali, maka akan dilakukan setelah inisiasi 'Blue Halo S' diimplementasikan.

Usulan kemitraan dalam komite teknis adalah sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga	Direktorat
Kemenko Marves	1. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

	2. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Budidaya Perikanan
KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 6. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 7. Direktur Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 8. Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bappenas	1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal 2. Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
BPDLH	1. Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Asisten Deputi Bidang Agro, Farmasi, dan Pariwisata

Disampaikan rencana kerja komite teknis adalah sebagai berikut:

Rapat komite teknis pertama akan berjalan setelah pengesahan SK Komite Teknis. Kemudian akan dilakukan rapat komite teknis berikutnya sebagai rapat evaluasi per 4 bulanan.

- Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan desain implementasi 'Blue Halo S', diharapkan tidak terlalu jauh deviasi waktu dari agenda yang direncanakan. Setiap anggota komite teknis yang relevan di masing-masing kegiatan diharapkan dapat turut terlibat penuh.
- Terkait rencana kegiatan, dalam waktu dekat akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke Provinsi wilayah WPP 572. Kunjungan ini dapat dikoordinasikan bersama teknis terkait (Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Konservasi Indonesia dan tim Abt consortium akan melibatkan anggota komite teknis terkait (sesuai dengan isu yang terkait dengan masing-masing anggota) dengan kegiatan-kegiatan desain.

Dukungan Komite Teknis untuk proposal pendanaan desain kepada Green Climate Funds (GCF):

- Pemerintah Indonesia secara prinsip menyetujui penerbitan No Objection Letter (NOL) untuk mendukung persyaratan pengajuan pendanaan proposal mekanisme hibah mendukung Blue Halo S.
- Kebutuhan akan co-financing untuk Blue Halo S pada tahapan implementasi program akan didiskusikan lebih lanjut.
- Komite Teknis menjadi wadah untuk memberikan masukan terhadap desain dan persiapan untuk pengajuan NOL.

Dalam mendukung hal tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan adalah telah dilaksanakan kick off meeting dan sosialisasi terkait tindak lanjut Blue Halo S pasca penandatanganan saat G20.

Faktor yang mendukung dalam capaian tersebut adalah adanya dukungan stakeholder dalam pelaksanaan studi Program Blue Halo S. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan isu strategis tersebut adalah terkait payung hukum pendanaan campuran untuk program Blue Halo S.

c) Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara, output antara yang telah disampaikan adalah telah disusunnya rancangan pemetaan kegiatan. Dalam rancangan pemetaan kegiataannya disampaikan bahwa Pembangunan Kota Baru Sofifi telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional sejak RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 (Major Project), dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Dalam koordinasi yang telah dilakukan pada tahun 2022, telah disepakati dilaksanakan pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai Major Project RPJMN 2020-2024 dengan menggunakan mekanisme pembiayaan On Top sebesar 807,5 Milyar rupiah pada 2023 dan 2,5 Triliun rupiah pada 2024.

Fokus kegiatan percepatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 berjumlah 24 kegiatan, yaitu 11 kegiatan akan dilaksanakan oleh K/L; 9 kegiatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara; 3 kegiatan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kegiatan; dan 1 Kegiatan melalui pendanaan swasta/KPBU (lampiran II). Ke-11 kegiatan yang direncanakan dilakukan oleh K/L di tahun 2023 yang masih memerlukan kepastian pendanaan On Top APBN adalah sebagai berikut:

K/L	Kegiatan Tahun 2023		Indikasi Kebutuhan
POLRI	(1)	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Polda	Rp 183.191.400.000
	(2)	Rehabilitasi Dermaga Polisi Air	Rp 53.000.000.000
Kementerian ATR/BPN	(3)	Perluasan/Penambahan Gedung Kantor, Kanwil BPN Prov. Malut	Rp 11.580.000.000
Kementerian Perhubungan	(4)	Lanjutan Pembangunan Kantor BPTD Maluku Utara	Rp 15.000.000.000
	(5)	Pembangunan Dermaga Sandar Pelabuhan Sofifi	Rp 80.000.000.000
Kementerian PUPR	(6)	Pembangunan Perumahan TNI AD	Rp 76.000.000.000
	(7)	Pembangunan Perumahan POLDA	Rp 294.722.000.000
	(8)	Pembangunan Rumah Dinas dan Mess Pegawai, Kanwil BPN Prov. Malut	Rp 32.100.000.000

K/L	Kegiatan Tahun 2023		Indikasi Kebutuhan
	(9)	Pembangunan Rusunawa ASN	Rp 29.965.000.000
	(10)	Pembangunan Rusunawa Nakes RSUD dan RSJ	Rp 29.965.000.000
	(11)	Desain Rehabilitasi Embung Sofifi	Rp 2.000.000.000
Total			Rp 807.523.400.000

Dalam mendukung capaian output antara tersebut, telah dilaporkan progres pengembangan Kota Baru Sofifi dan Rencana Kunjungan Kerja dari Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan isu strategis tersebut adalah kepastian pendanaan yang belum ada. Tindak lanjut dari pelaksanaan isu strategis tersebut adalah akan dilakukan pemantauan progres pengembangan Kota Baru Sofifi.

d) Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi revitalisasi tambak udang, output antara yang telah disampaikan adalah telah dilaksanakan koordinasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pakar Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang. Dalam koordinasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Strategi budidaya udang untuk mencapai target produksi 2 juta ton tahun 2024
- antara lain:
 - Revitalisasi untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional serta untuk meningkatkan nilai tukar pembudidaya ikan,
 - Modelling membangun tambak udang terintegrasi berbasis kawasan dengan produktivitas 80 ton/ ha/ tahun dan mengimplementasikan konsep ekonomi biru
- Pertumbuhan ekonomi 2022 dan 2023 diproyeksikan mengalami penurunan hampir di seluruh wilayah di dunia. Inflasi tinggi terjadi di seluruh negara tujuan ekspor utama. Upah dan kepercayaan konsumen menurun akan berdampak pada pengeluaran konsumen

- DED dan masterplan pertambakan di Aceh Timur, Lampung Selatan, Pinrang, Sumbawa, untuk pelaksanaan akan dilakukan tahun ini kecuali Sukamara. Kemen PUPR membutuhkan DED pertambakan udang dilokasi lain dan akan dibangun oleh Kemen PUPR
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan diterbitkan jika ketentuan umum penataan zonasi pada RTRW tidak melarang adanya tambak udang
- Kementerian Investasi memiliki program supervisi ke daerah dan akan memasukan perizinan tambak udang pada saat supervisi
- Masukan pakar untuk meningkatkan produksi mencontoh Vietnam dan Ekuador yang sudah menerapkan Genetic Improvement untuk benih unggul, Menggunakan budidaya two step (nursery dan grow out) yang sudah memiliki regulasi, sudah terdapat pakan fungsional dan imunostimulan untuk kekebalan tubuh sedangkan Indonesia masih impor dari vietnam dan amerika, pemerintah perlu membuat aturan setiap teknologi. Pemerintah juga perlu memprioritaskan
- Perizinan tambak udang di Vietnam dan Ekuador merupakan wewenang pemerintah pusat, maka jika ingin meniru pertambakan udang negara tersebut perlu menarik perizinan tambak udang ke pusat juga.
- Tambak udang di Indonesia sebagian besar belum sesuai dengan standar, jika dilakukan penindakan tegas, produksi udang akan turun drastis. Sedangkan di vietnam dan ekuador sekitar 80 – 90 % petambak telah tersertifikasi
- Tambak perikanan perlu memiliki irigasi sendiri seperti irigasi pada pertanian agar lebih produktif

Dalam mendukung capaian output antara tersebut, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persoalan aktivitas pertambakan udang di Karimunjawa. Kondisi saat ini terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat limbah organik dari pertambakan eksisting. Diperlukan revisi peraturan daerah untuk melarang tambak baru dan pengawasan tambak eksisting yang tidak sesuai. Sebagai solusi, pemerintah telah melaksanakan

program moratorium tambak baru, pembuatan IPAL, sosialisasi CBIB, penerapan pengelolaan limbah, sistem IMTA, dan sosialisasi pedoman pengelolaan limbah. Keseluruhan hal tersebut dijalankan untuk mencegah dampak buruk dan memastikan pengelolaan yang lebih baik.

- Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi terkait revitalisasi pertambakan udang di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menghadapi beberapa isu strategis dalam upaya peningkatan produksi udang, seperti pendangkalan saluran irigasi, pengelolaan lahan tambak yang masih tradisional, kualitas input produksi yang kurang memadai, akses pendanaan yang terbatas, dan penurunan daya dukung lingkungan. Solusi yang diusulkan meliputi sinergi kebijakan dan program dengan kabupaten dan stakeholder terkait, bimbingan teknis kepada petambak, pemantauan kualitas air dan lingkungan secara berkala, pembinaan kelompok, revitalisasi saluran irigasi, pemberian bantuan alat sedot lumpur, dan perbaikan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah sedimentasi dan pendangkalan saluran irigasi, direkomendasikan pengerukan sedimen dengan metode build with nature, merubah daerah sekitar teluk menjadi kawasan bakau, dan melakukan prafeasibility study revitalisasi tambak. Kementerian PUPR dan Kementerian I&W Belanda bekerja sama dalam program Partners for Water untuk meneliti penurunan produktivitas udang dan ikan di Sidoarjo. EcoShape, konsorsium Sektor Air Belanda, mengusulkan agar menerapkan prinsip Building With Nature pada upaya revitalisasi. Konsepnya yaitu menciptakan lahan basah di sepanjang anak sungai dan membentuk hutan bakau di muara sungai. Hal Ini dinilai akan dapat meningkatkan keuntungan pembudidaya, mengurangi banjir perkotaan, dan memberikan manfaat ekologis dan penyimpanan karbon.
- Telah dilaksanakan Steering Commite Meeting POKJA Peningkatan Industri Udang Nasional. Kondisi eksisting ekspor udang Indonesia belum mencapai target, sementara isu yang dihadapi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi global dan inflasi tinggi di negara tujuan ekspor. Solusinya meliputi strategi budidaya udang seperti revitalisasi tambak tradisional, pembangunan tambak terintegrasi, peningkatan nilai tambak melalui program PHLN, dan implementasi regulasi untuk peningkatan produksi. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu

memperhatikan sertifikasi, irigasi tambak, dan kerja sama investasi dengan negara seperti Tiongkok.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah didalam Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terkait Penetapan Kebijakan, Program dan Anggaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dinamis, selain itu, dukungan yang diberikan relatif masih minim.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan rapat rutin dan membahas hal yang lebih spesifik seperti penyakit, ekspor dan lain – lain
- Perkembangan produksi dan ekspor udang perlu dilaporkan kepada Menko Marves pada bulan mei

e) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk KP ke China

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi penyelesaian permasalahan produk KP ke China, output antara yang telah disampaikan adalah telah adanya surat penyampaian GACC Announcement No. 131 (2022) terkait Manajemen Karantina Produk Impor yang disampaikan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- KBRI Beijing menerima informasi Pengumuman GACC No. 131 yang diberlakukan sejak 8 Januari 2023, terkait dengan impor produk pangan Tiongkok, khususnya dalam kriteria rantai dingin seperti produk laut beku dan produk pangan lainnya yang dikirimkan dalam bentuk beku, maupun produk-produk lain yang tidak mask dalam kriteria rantai dingin, dimana GACC tidak lagi memberlakukan uji COVID-19 di pelabuhan penerima.
- Hasil pantauan KBRI, pihak Tiongkok telah sepenuhnya memulihkan kondisi impor pangan tanpa uji COVID-19, namun- demikian pemenuhan GACC Decree No. 248 dan No. 249 terkait registrasi perusahaan untuk ekspor produk pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan serta prosedur pelabelan kemasan, tetap harus dipenuhi.

- KBRI Beijing mengharapkan dukungan Pemri pusat untuk kiranya dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan terkait uji COVID-19 pada produk pangan dalam rantai beku yang akan diekspor ke Tiongkok maupun pada karyawan perusahaan dimaksud. Selain itu, KBRI Beijing juga mengharapkan dukungan Pemri pusat untuk kiranya dapat menyampaikan informasi ini kepada pelaku usaha Indonesia maupun pihak-pihak terkait lainnya di Indonesia.

Faktor yang mendukung kegiatan tersebut adalah adanya komunikasi yang intens dengan BKIPM dan Atase Perdagangan di China. Kendala yang dihadapi atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 177 UPI yang belum mendapatkan respon GACC
- 161 UPI yang tidak mau melakukan registrasi melalui China Import Food Enterprises Registration (CIFER)
- 16 UPI yang belum dapat melakukan proses registrasi melalui CIFER dikarenakan masih berstatus suspend (kasus temuan covid)
- Perbedaan HS Code antara Indonesia dan China

Rencana tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan BKIP selaku otoritas kompeten.

f) Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX

Pada pelaksanaan isu strategis kerja sama penelitian riset kelautan Ocean X, output antara yang telah disampaikan adalah telah ditetapkan tim kerja kemitraan dalam penelitian, pengembangan teknologi dan kapasitas sumber daya kelautan.

Dalam mendukung capaian output antara tersebut, telah dilakukan permohonan bantuan telaah Draft Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kemitraan dalam Penelitian Kelautan, Teknologi dan Pengembangan Kapasitas dan serta adanya Letter of Intent antara Kemenko Marves dengan Oceanographic Research & Exploration Foundation, G Forty Two General Trading Llc Dan Gtech Digital Asia Mengenai Kemitraan Dalam Penelitian Kelautan, Teknologi Dan Pengembangan Kapasitas.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan capaian output antara tersebut adalah sebagai berikut:

- Pernyataan Kehendak (LOI) 4 Pihak yang ditandatangani pada masa pelaksanaan G20/O20 16 November 2022 antara Kemenko Marves - OceanX - G42 - GTech Digital Asia "in Partnership of Marine Research and Technology, Media Awareness & Capacity Development";
- Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) Kerja Sama Riset Kelautan dan Teknologi, Kepedulian Media dan Peningkatan Kapasitas antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX, G42 dan GTech Digital Asia (Usulan ABT);
- Undangan Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Pimpinan K/L Terkait yang di pimpin oleh Menko Marves pada 3 Januari 2023
- Surat Plt. Deputi SDM-Marves kepada K/L Terkait dan NGO dengan perihal Rencana Audiensi, Rakor dan Kunjungan Laboratorium;
- Surat Plt. Deputi SDM-Marves kepada Asisten Intelejen Panglima TNI perihal Permohonan Secure Clearance
- Undangan Plt. Deputi SDM-Marves dalam pelaksanaan rakor, diantaranya:
- Pembahasan Lintas K/L tentang Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang dilaksanakan pada 19 Januari 2023;
- Pembahasan Perizinan Kapal Riset pada tanggal 9 Feb 2023;
- Pembahasan penetapan rincian pelaksanaan kegiatan 2023 yang dihadiri oleh 6 K/L, Universitas dan NGO;
- Pembahasan Tahapan Kerja Sama Lintas K/L

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terkait pembahasan ketersediaan funding dalam mendukung pelaksanaan kegiatan riset dan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penetapan Tim Kerja melalui SK Menko Marves;
- Finalisasi Konsep/Draft MoU 4 Pihak;
- Pembagian Tugas berdasar kelompok Tim Kerja;
- Penyusunan Time Line Tim Kerja/Pelaksanaan Kegiatan;
- Penetapan Rincian Pelaksanaan Kegiatan 2023.

g) Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi pelaksanaan kerja sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20, pada Triwulan I telah dicapai output antara penerbitan

SK tentang Kelompok Kerja Inisiasi Side Event Ocean20 pada Presidensi G20 India Tahun 2023.

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah telah dilakukan koordinasi dan telah menghadiri kegiatan Ocean20 guna meningkatkan koordinasi side event Ocean20 pada Forum G20 TA 2023.

h) Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi tata kelola kelapa sawit, pada Triwulan I telah dicapai output antara penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Dalam Kepres tersebut disampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diamanahkan sebagai Ketua Pengarah dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim diamanahkan sebagai Sekretaris Pelaksana I.

Faktor yang mendukung dalam capaian tersebut adalah telah dilaksanakan Audit Tata Kelola Industri Sawit dan Tindak Lanjut Audit Kelapa Sawit.

i) Koordinasi Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP), pada Triwulan I telah dilakukan pembahasan terkait tugas dan fungsi keanggotaan co-chairs taskforce dari K/L, identifikasi program kerja dari setiap taskforce dan koordinasi internal taskforce.

Faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah adanya koordinasi yang baik dengan UN Indonesia serta peran aktif seluruh Eselon II lingkup Deputi SDM dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam NBAAP Task Force.

Kendala yang dihadapi adalah terdapat beberapa indikator RPJMN yang belum ada di platform NBAAP dan terdapat pula beberapa indikator RPJMN yang ada di NBAAP (Blue Health TF) yang belum didukung oleh program/kegiatan anggota TF.

Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembahasan kembali antara Kemenko Marves, Bappenas, dan Kemenkeu mengenai perbaikan indikator RPJMN dari Blue Finance TF.
- Penyusunan Letter of Assignment NBAAP untuk meningkatkan komitmen anggota.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS.3) Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

5. Indikator Kinerja 5 adalah “Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”

Dalam mencapai Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2023, progress antara yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- Dokumen PK Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023
- Dokumen Rencana Aksi Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023
- Dokumen Laporan Kegiatan Periodik TA 2023

6. Indikator Kinerja 6 adalah “Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”

Dalam mencapai Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2023, progress antara yang telah dicapai adalah telah tersusunnya rencana kerja RB Tematik Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023:

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN	
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/ KENDALA	TINDAK LANJUT		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			Peningkatan Realisasi Investasi	Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	Ditindaklanjuti Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir				v			v			v				Dokumen Tindaklanjuti Kebijakan (Dokumen Penyelesaian Penataan Ruang dan Zonasi yang Terpadu)	Diisi oleh Unit Eselon II Lingkup D2	Diisi oleh Unit Eselon II Lingkup D2	Diisi oleh Unit Eselon II Lingkup D2	Diisi oleh Unit Eselon II Lingkup D2
			Peningkatan Realisasi Investasi	Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)	Ditindaklanjuti Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir				v			v			v				Dokumen Perhitungan IKLI Agreat 2023				

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/KENDALA	TINDAK LANJUT	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			Peningkatan Realisasi Investasi	Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut	Ditindaklanjuti rumusan Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir													Dokumen Tindak Lanjut Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut				
			Peningkatan Realisasi Investasi	Penyelesaian Rencana Zonasi	Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau Perpres RTR KSN/RZKAW	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir													Kertas Kerja Rumusan Kebijakan Penyelesaian Rencana Zonasi				
			Peningkatan Realisasi Investasi	Rumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPP	Ditindaklanjuti nya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPP	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap													Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan Pengelolaan SDI di WPP				
			Peningkatan Realisasi Investasi	Koordinasi Blue Halo S	Mendorong terselesaikannya Studi Pendahuluan untuk Pendanaan Blue Halo S	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap													Dokumen Mekanisme Adaptasi Blue Halo S				
			Peningkatan Realisasi Investasi	Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX	Ditindaklanjuti nya Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim													Dokumen pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama				
A	RB TEMATIK		Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pengendalian Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ditindaklanjuti nya Pengendalian Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir													Dokumen Tindaklanjuti kebijakan (Dokumen Optimalisasi Capaian Konservasi Perairan dan IA SEA-COPS)"				
			Penurunan Tingkat Kemiskinan	Rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	Ditindaklanjuti nya Rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap													Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan				
			Penurunan Tingkat Kemiskinan	Rumusan Kebijakan Tata Kelola Perikanan Tangkap dan SDM Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ditindaklanjuti nya Rumusan Kebijakan Tata Kelola Perikanan Tangkap dan SDM Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap													Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan Tata Kelola Perikanan Tangkap dan SDM	- Inspeksi bersama terkait Pendidikan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan			
			Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pengendalian Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya rumusan kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Asdep Peningkatan Daya Saing													Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/KENDALA	TINDAK LANJUT	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			Prioritas Presiden	Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)	Mendorong Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir			v			v			v				Dokumen Progres NBAAP Tahun 2023				
			Prioritas Presiden	Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Sofifi Maluku Utara	Mendorong Penyelesaian Pembangunan Ibu Kota Sofifi	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap			v			v			v				Dokumen Pembangunan Ibu Kota Sofifi				
			Prioritas Presiden	Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	Ditindaklanjuti rumusan kebijakan akselerasi produksi dan revitalisasi tambak udang	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya			v			v			v				Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan				
			Prioritas Presiden	Pengendalian Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	Ditindaklanjuti rumusan kebijakan akselerasi produksi dan revitalisasi tambak udang	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya			v			v			v				Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan				
			Prioritas Presiden	Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak udang	Ditindaklanjuti Kegiatan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya			v			v			v				Laporan Capaian Pelaksanaan Isu Strategis	-Pokja Nasional Akselerasi Produksi Udang -Simplifikasi Perizinan Berusaha; -Penguatan Kelembagaan Poklina; -Koordinasi dan Sinkronisasi Revitalisasi Irigasi Pertambakan Rakyat; - Pelimpahan Kewenangan Pupuk Bersubsidi; - Pembebasan PPN Untuk Komoditas Udang; - Pengembangan Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan; -Pilot Project Climate Smart Shrimp;	Capaian nilai ekspor masih dibawah target dan perlu ditingkatkan lagi	-Koordinasi Revitalisasi Tambak dan Akselerasi Produksi Udang (Modeling, Cluster, Integrasi Irigasi untuk Tambak rakyat) -Monitoring Implementasi Crash Program Revitalisasi Tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor secara regular dan kontinyu -Monitoring Pencapaian Target MP Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng - Pengawasan Penyusunan DED dan Master Plan di lokasi prioritas (Gresik, Takalar) - Pengawasan Tambak Estate Kebumen -Sosialisasi Perizinan dan Pengawasan Tambak	

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/ KENDALA	TINDAK LANJUT	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																			Udang -Pembuatan Hotline Pengaduan Perizinan Tambak Pelimpahan Kewenangan Pupuk Bersubsidi Integrasi KP dalam Komisi Irigasi di beberapa provinsi produsen udang Sertifikasi Akuakultur : Indo GAP/CBIB				
			Prioritas Presiden	'Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman	Ditindaklanjuti nya rumusan Kebijakan Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim		v			v				v	Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman							
			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Ditindaklanjuti nya rumusan pengendalian Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya			v			v			v	Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan	Keberhasilan program pemulihan nasional	Penambahan jumlah unit KJA yang tidak berkolerasi secara linier dengan peningkatan produktivitas budidaya	-Penataan KJA Danau Toba, Penentuan Revisi Daya dukung Lingkungan dan Equilibrium baru aktifitas ekonomi sekitar toba - Penanganan KJA Jatiluhur, Saguling Cirata - Pemanfaatan produk dalam negeri dibidang Akuakultur : Kit Diagnostik - Penyusunan skema perkreditan Budidaya (BRI) -Integrasi KP dalam Komisi Irigasi di beberapa provinsi produsen udang - Pengawasan ketersediaan input produksi (benih, bibit dan pakan)				

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/KENDALA	TINDAK LANJUT	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																			untuk komoditas unggulan budidaya - Penyusunan rekomendasi Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya				
			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Koordinasi Pengembangan Seaweed Estate Terintegrasi	Ditindaklanjuti Kegiatan 'Koordinasi Pengembangan Seaweed Estate Terintegrasi	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya		v			v				v	Laporan Capaian Pelaksanaan Isu Strategis	Jumlah bantuan yang diberikan untuk kegiatan benih dan induk unggul telah mencapai target	Faktor iklim dan lingkungan menjadi hambatan	-Fasilitasi Pengembangan tissue culture/kultur jaringan antara Biotrop, swasta dan pemda Kab. Maluku Tenggara dan Provinsi Kepulauan Riau - Penyusunan crash program pengembangan seaweed dan fasilitasi kerjasama CBI dan UNIDO dengan stakeholders terkait - Implementasi ODA Seaweed Project kerjasama Indonesia-Korea di Maluku Tenggara dan Pulau Batam -Koordinasi pengembangan kampung budidaya terintegrasi hulu hilir 6 lokasi percontohan - Pengembangan korporasi pembudidaya 2 lokasi percontohan -Monev implementasi pengembangan klaster budidaya				

NO	KOMPONEN	NO	TEMA	KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (UNIT ESELON II)	WAKTU PENCAPAIAN												HASIL	DAMPAK	PEMANTAUAN DAN EVALUASI		KETERANGAN
							TW I			TW II			TW III			TW IV					HAMBATAN/KENDALA	TINDAK LANJUT	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
																			unggulan - Penyusunan rekomendasi pengembangan klaster budaya unggulan				
			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pengendalian Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya rumusan kebijakan pemanfaatan teknologi iradiasi bagi prduk kelautan dan perikanan	Asdep Peningkatan Daya Saing		v			v				v		Dokumen Kertas Kerja Kebijakan						
			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pengendalian Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi	Asdep Peningkatan Daya Saing		v			v				v		Dokumen Kertas Kerja Kebijakan						
			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya	Ditindaklanjuti nya Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim		v			v				v		Dokumen Tindak Lanjut Kebijakan 'Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya						
			Transformasi Digital	Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	Ditindaklanjuti nya Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	Asdep Peningkatan Daya Saing		v			v				v		Dokumen Tindak Lanjut Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan						
			Transformasi Digital	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Ditindaklanjuti nya rumusan pengendalian Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim		v			v				v		Dokumen tindak lanjut Kebijakan 'Riset dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim						
			Transformasi Digital	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20	Didiorongnya Kerja Sama Ocean 20 sebagai Forum Kelautan Global G20	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim									v		Dokumen Draft MoU Ocean20						
			Transformasi Digital	Koordinasi Tata Kelola Industri Sawit	Perbaikan manajemen tata kelola industri sawit dan peningkatan penerimaan negara	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim																	

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 14.500.000.000,-. Lalu kemudian Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendapatkan self blokir sebesar Rp. 975.150.000,- sehingga pagu efektif Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023 adalah Rp. 13.524.850.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-	Rp155.150.000,-	1.344.850.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.500.000.000,-	Rp. 975.150.000,-	Rp13.524.850.000

Capaian realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp. **2.819.819.599,-** atau **20,85%** dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut:

ket	pagu awal	pagu setelah blokir	realisasi	siswa	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	13.524.850.000	13.524.850.000	2.819.819.599	10.705.030.401	20,85
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.474.850.000	11.474.850.000	2.591.396.198	8.883.453.802	22,58
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2.050.000.000	2.050.000.000	280.116.204	1.769.883.796	13,66
Pengendalian Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	491.522.000	491.522.000	91.850.019	399.671.981	18,69
Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	500.000.000	500.000.000	138.129.845	361.870.155	27,63
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)	600.000.000	600.000.000	20.029.000	579.971.000	3,34
Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut	458.478.000	458.478.000	30.107.340	428.370.660	6,57
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.140.000.000	2.140.000.000	367.194.828	1.772.805.172	17,16
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perikanan Tangkap	647.469.000	647.469.000	116.911.900	530.557.100	18,06

ket	pagu awal	pagu setelah blokir	realisasi	sis	%
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	953.902.000	953.902.000	75.390.708	878.511.292	7,90
Pengendalian Kebijakan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap	538.629.000	538.629.000	174.892.220	363.736.780	32,47
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2.140.000.000	2.140.000.000	460.333.531	1.679.666.469	21,51
Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	708.732.000	708.732.000	99.743.146	608.988.854	14,07
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	720.801.000	720.801.000	208.383.922	512.417.078	28,91
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	710.467.000	710.467.000	152.206.463	558.260.537	21,42
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1.900.000.000	1.900.000.000	458.756.127	1.441.243.873	24,15
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	620.704.000	620.704.000	146.686.300	474.017.700	23,63
Pengendalian Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	627.322.000	627.322.000	199.484.677	427.837.323	31,80
Pengendalian Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	651.974.000	651.974.000	112.585.150	539.388.850	17,27
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1.900.000.000	1.900.000.000	296.459.484	1.603.540.516	15,60
Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman	800.000.000	800.000.000	119.510.525	680.489.475	14,94
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	603.319.000	603.319.000	72.467.999	530.851.001	12,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	496.681.000	496.681.000	104.480.960	392.200.040	21,04
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	3.394.850.000	3.394.850.000	956.959.425	2.437.890.575	28,19
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim	1.344.850.000	1.344.850.000	728.536.024	616.313.976	54,17
5601 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.050.000.000	2.050.000.000	228.423.401	1.821.576.599	11,14
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	400.000.000	400.000.000	74.626.000	325.374.000	18,66
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	626.520.000	626.520.000	81.206.619	545.313.381	12,96
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	400.000.000	400.000.000	18.545.300	381.454.700	4,64
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	488.437.000	488.437.000	36.306.182	452.130.818	7,43
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	135.043.000	135.043.000	17.739.300	117.303.700	13,14

4. PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan program yang disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target dari apa yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK). Tercapainya target pada tiap kegiatan tidak berarti tanpa masalah dan kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melakukan tugas dan fungsi sesuai fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian pada Kementerian/ Lembaga dan *stakeholders* yang menjadi mitra dalam rangka tercapainya fungsi kelembagaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan/program yang telah terlaksana pada Triwulan I Tahun 2023, maka perlu adanya dorongan percepatan dan peningkatan kinerja dalam rangka mempercepat kebijakan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait. Selain kerja sama dengan pihak eksternal, penting juga adanya peningkatan kerja sama internal untuk mewujudkan sinergisitas yang lebih baik lagi di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.